

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo, 2007.
- Astawa, I Gde Pantja, Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2008.
- Astawa, I Gde Pantja. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Cet 1. Bandung: PT. Alumni. 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Febrian, *Hirarki Aturan Hukum di Indonesia* (Disertasi), Universitas Airlangga, 2004.
- Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Krina, L. L. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas, 2004.
- Latif, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, UII press, 2005.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV Mandar Maju. 1989.
- Lubis, M.Solly. *Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju, 2007.
- M. Trubek, David dan Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2009.

- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. 1992.
- . *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung, LPPM-Unisba, 1995.
- Marzuki, M. Laica. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas. 1999.
- Natabaya, H.A.S.. *Sistem Peraturan Perundang-Perundangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif-sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan. 1999.
- Soejadi, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Cet 5. Yogyakarta; Kanasius, 2007.
- Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Sukowiyono. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta, Penerbit Faza Media, 2006.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung, Fokus Media, 2009.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta; CAPS. 2012.
- Yamin, Muhammad. *Naskah persiapan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 jilid (1)*, Jakarta, Siguntang, 1974.

2. Makalah, Majalah, Surat Kabar, Website

<http://ilearn.unand.ac.id/blog/index.php?entryid=57> diunduh pada tanggal 25 februari 2014

<http://ilearn.unand.ac.id/blog/index.php?entryid=57> diunduh tanggal 27 februari 2014

<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=persepsi-hukum-dalam-pembangunan> diunduh pada tanggal 25 Januari 2014

Mahendra, Oka AA, *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Makalah disajikan pada acara Seminar Sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara dan Pengelolaan Prolegda di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2006.

RS, Iza Rumesten. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk hukum daerah*, Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 38 tahun XIII, Januari, 2009.

RS, Iza Rumesten. *Reformasi Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, Majalah Simbur Cahaya No. 37 Tahun XII, September, 2008.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan